



**KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK
DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
PEKALONGAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PERUMDA
TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN)**



PERUMDA TIRTAYASA

Kota Pekalongan

MUHAMMAD DARUL FIKRI

NIM. 4121107

2025

**KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA PEKALONGAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS
PADA PERUMDA TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

MUHAMMAD DARUL FIKRI

NIM. 4121107

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA PEKALONGAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS
PADA PERUMDA TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)



MUHAMMAD DARUL FIKRI

NIM. 4121107

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Darul Fikri

NIM : 4121107

Judul Skripsi : **KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKALONGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA PERUMDA TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 September 2025
Yang Menyatakan,



Muhammad Darul Fikri
NIM 4121107

NOTA PEMBIMBING

amp : 2 (dua) ekssempler

al : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Darul Fikri

th.

ekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

g. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

assalamu 'alaikum Wr. Wb.

telah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya
rimkan naskah Skripsi Saudara :

ama : Muhammad Darul Fikri

IM : 4121107

dul Skripsi : **KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA PEKALONGAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS
PADA PERUMDA TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN)**

askah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera
munaqosahkan.

emikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

tas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

assalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 September 2025

Pembimbing,



Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I
NIP. 198703112019081001



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Darul Fikri

NIM : 4121107

Judul Skripsi : **KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKALONGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA PERUMDA TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN)**

Dosen Pembimbing : **Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I**

Telah diujikan pada 1 Oktober dan dinyatakan **Lulus** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Tamamudin, S.E, M.M
NIP. 197910302006041018


Rohmat Abidin, M.Kom
NIP. 198801062020121006

Pekalongan, 17 Oktober 2025

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. H. AM. Muh. Khalidz Ma'Shum, M. Ag.
NIP. 197806162003121003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Al-Insyirah : 8)

“Jalani terus roda kehidupan walau berat kau rasakan. Coba bersyukur dalam segala hal walau kadang menyakitkan.”

(Denny Frust)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang telah mengiringi hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
2. Orang tua penulis, Bapak Maryanto dan Ibu Harniti yang telah berjuang untuk bisa memberikan pendidikan layak kepada penulis serta senantiasa mendoakan, mendukung dan mengapresiasi setiap langkah penulis dalam menempuh pendidikan hingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Adik-adik saya serta seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta doa terbaik untuk keberhasilan saya.
4. Almamater penulis, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas fasilitas yang selama ini diberikan selama penulis berkuliah.
5. Dosen pembimbing skripsi Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I yang telah meluangkan waktu diantara kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Bapak Muh. Izza, M.S.I

7. Perumda Tirtayasa Pekalongan dan seluruh narasumber dari yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam mencari data penelitian.
8. Teman-teman saya yang selalu hadir dengan dukungan, semangat, dan kebersamaan dalam setiap situasi.
9. Dan terkhusus untuk 120317 yang selalu hadir menemani, menyemangati, dan memberikan banyak bantuan dalam setiap situasi yang dihadapi. Terima kasih telah menjadi motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.



ABSTRAK

Muhammad Darul Fikri. Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan berdasarkan perspektif ekonomi syariah dengan mengambil studi kasus pada Perumda Tirtayasa. Dalam era otonomi daerah, BUMD memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan staf internal Perumda Tirtayasa dan pelanggan, serta analisis dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perumda Tirtayasa memberikan kontribusi konsisten terhadap PAD Kota Pekalongan melalui penyediaan layanan air bersih yang berkualitas kepada masyarakat. Pengelolaan Perumda Tirtayasa yang halal, adil, dan transparan mencerminkan maqashid menjaga agama (al-Din). Layanan air bersih yang tersedia menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa (al-Nafs) masyarakat. Upaya peningkatan kapasitas dan transparansi informasi mendukung maqashid menjaga akal (al-‘Aql) serta mendorong partisipasi masyarakat. Pengelolaan berkelanjutan dan distribusi akses air yang adil menjamin keberlangsungan kehidupan generasi mendatang, sejalan dengan maqashid menjaga keturunan (an-Nasl). Pengelolaan keuangan yang profesional dan berkeadilan dalam pendistribusian laba mencerminkan maqashid menjaga harta (al-Mal).

Perumda Tirtayasa dapat dianalogikan sebagai Baitul Mal yang mengelola dan mendistribusikan kekayaan daerah.

Maqashid syariah menjadi kerangka normatif dan operasional yang kuat untuk memastikan bahwa baitul mal berfungsi secara efektif menjadi lembaga sosial ekonomi yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah tercermin dalam penetapan tarif yang transparan melalui musyawarah, pengelolaan layanan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, komunikasi terbuka melalui media digital, serta program subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maqashid syariah menjadi kerangka normatif dan operasional yang kuat untuk memastikan bahwa baitul mal berfungsi secara efektif menjadi lembaga sosial ekonomi yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat.

Kontribusi Perumda Tirtayasa tidak hanya diukur dari aspek finansial terhadap PAD, tetapi juga dari implementasi nilai-nilai syariah dalam operasionalnya. Penyediaan layanan air bersih yang halal, transparansi dalam penetapan tarif, dan program subsidi mencerminkan komitmen terhadap prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi transparansi dan kualitas layanan yang perlu terus ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BUMD, khususnya Perumda Tirtayasa, memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD sekaligus mewujudkan tata kelola yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Kata Kunci: BUMD, Pendapatan Asli Daerah, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Muhammad Darul Fikri. The Contribution of Regional Government-Owned Enterprises in Increasing Regional Original Income of Pekalongan City Based on Islamic Economic Perspective (Case Study on Perumda Tirtayasa Pekalongan City)

This research aims to analyze the contribution of Regional Government-Owned Enterprises (BUMD) in increasing Regional Original Income (PAD) of Pekalongan City based on Islamic economic perspective, taking a case study on Perumda Tirtayasa. In the era of regional autonomy, BUMD plays a strategic role in enhancing regional independence through optimizing local economic potential in accordance with Islamic economic principles.

This research uses a qualitative approach with a case study method, collecting data through in-depth interviews with internal staff of Perumda Tirtayasa and customers, as well as analysis of supporting documents. The results of the study indicate that Perumda Tirtayasa consistently contributes to the Regional Original Income of Pekalongan City by providing quality clean water services to the community. The halal, fair, and transparent management of Perumda Tirtayasa reflects the maqashid of preserving religion (al-Din). The available clean water services maintain the health and safety of the community's souls (al-Nafs). Efforts to increase capacity and transparency of information support the maqashid of preserving reason (al-'Aql) and encourage community participation. Sustainable management and equitable distribution of water access ensure the sustainability of the lives of future generations, in line with the maqashid of preserving descendants (an-Nasl). Professional and equitable financial management in the distribution of profits reflects the maqashid of preserving wealth (al-Mal).

Perumda Tirtayasa can be likened to the Baitul Mal (Islamic trust fund) that manages and distributes regional wealth. Maqashid sharia serves as a strong normative and

operational framework to ensure that the Baitul Mal functions effectively as a socio-economic institution capable of providing the widest possible benefits based on the principles of justice, transparency, and the welfare of the people. The application of sharia economic principles is reflected in transparent tariff setting through deliberation, service management oriented towards public welfare, open communication through digital media, and subsidy programs for low-income communities. Maqashid sharia serves as a strong normative and operational framework to ensure that the Baitul Mal functions effectively as a socio-economic institution capable of providing the widest possible benefits based on the principles of justice, transparency, and the welfare of the people.

Perumda Tirtayasa's contribution is measured not only from financial aspects toward PAD, but also from the implementation of Islamic values in its operations. The provision of halal clean water services, transparency in tariff setting, and subsidy programs reflect commitment to the principles of benefit and social justice. Nevertheless, there are still challenges in optimizing transparency and service quality that need continuous improvement. This research concludes that BUMD, particularly Perumda Tirtayasa, has great potential in increasing PAD while realizing governance in accordance with Islamic economic principles.

Keywords: BUMD, Regional Original Income, Islamic Economics

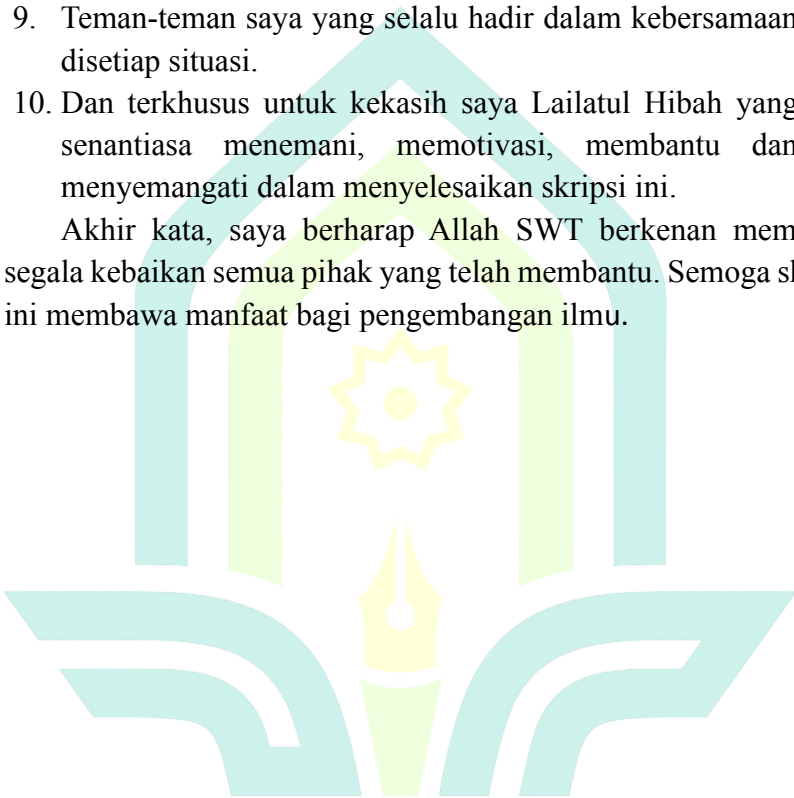
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmatnya dan inayah-Nya sehingga skripsi ini berjudul “Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan)” dapat terselesaikan dengan baik. Menulis Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum.M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Muhammad Aris Syafi'i, M.E.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Muh. Izza, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Bapak Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, selaku dosen pembimbing skripsi dan bersedia meluangkan waktu, memberikan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa memberikan ilmunya dan membantu setiap proses pembelajaran.

7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material, moral dan selalu memberikan motivasi.
8. Pihak Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan dan Seluruh narasumber yang berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk penelitian ini sehingga penelitian ini berjalan lancar.
9. Teman-teman saya yang selalu hadir dalam kebersamaan disetiap situasi.
10. Dan terkhusus untuk kekasih saya Lailatul Hibah yang senantiasa menemani, memotivasi, membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Landasan Teori	10
B. Telaah Pustaka	30
C. Kerangka Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Subjek dan Objek Penelitian	43
E. Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Analisis Data	46
H. Pengecekan Keabsahan Temuan	49
I. Sistematika Pembahasan	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan.....	53
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	99
A. KESIMPULAN	99
B. KETERBATASAN PENELITIAN	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berlandaskan pada hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ – kataba

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - suila

كَيْفَ - kaifa

حَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قَاتَلَ - qāla

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl

- raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-

Munawwarah

-al-Madīnatul

Munawwarah

طَلْحَةَ - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرُّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterate-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterate-rasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
3. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
الْقَلَمُ	- al-qalamu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah yang terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	- ta'khuẓu
----------	------------

شَيْءٌ - syai'un

النَّوْءُ - an-nau'u

إِنَّ - inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ بِحْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Ar-rahmānir rahīm

Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

- Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

- Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru
jamī'an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

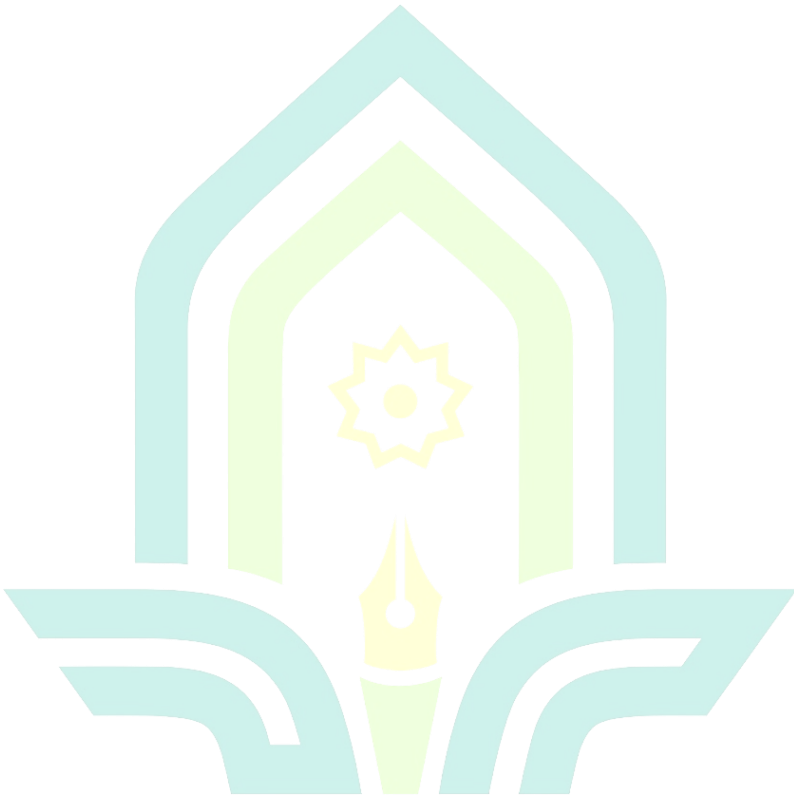
DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Telaah Pustaka	30
Tabel 4. 1 Sumber Air Perumda Tirtayasa	57
Tabel 4. 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Perumda Tirtayasa	64



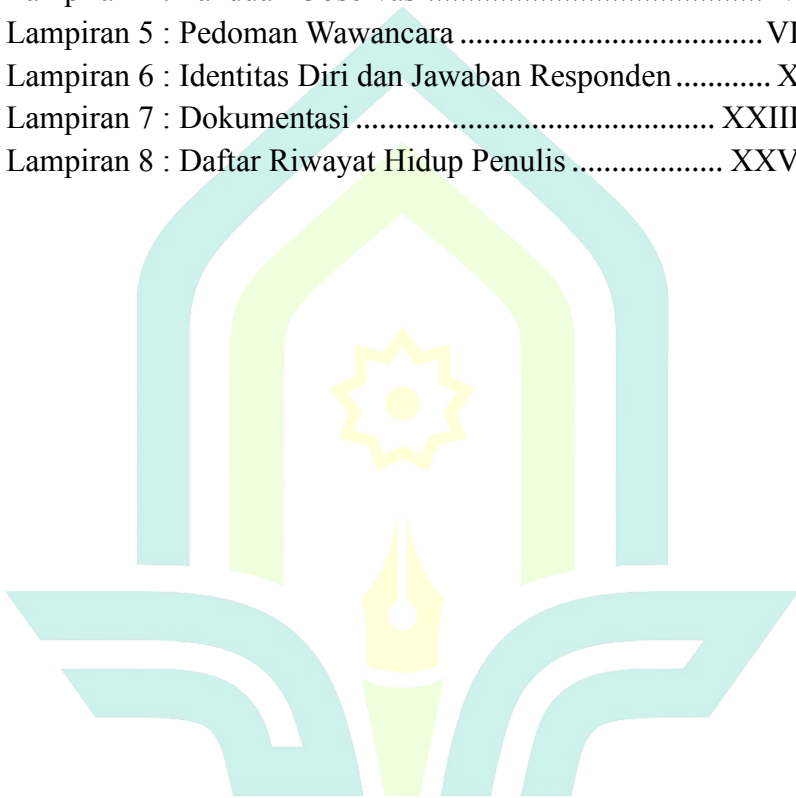
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lambang Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan.	5
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	40
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Perumda Tirtayasa	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian.....	I
Lampiran 2 : Surat Persetujuan Izin Peneltian dan Telah Melakukan Penelitian	II
Lampiran 3 : Surat Pengantar Wawancara.....	III
Lampiran 4 : Panduan Observasi.....	IV
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara	VI
Lampiran 6 : Identitas Diri dan Jawaban Responden	X
Lampiran 7 : Dokumentasi	XXIII
Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup Penulis	XXV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dari masa Orde Lama ke Orde Baru, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan langsung kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayah dan mengatur sendiri urusan daerah. Hak dan kewajiban ini meliputi pengurusan, pengelolaan urusan pemerintahan, serta meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam pengelolaan pelayanan publik dan pemerintah. Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, masing-masing terdiri dari kota dan kabupaten, dan tiap daerah mempunyai pemerintah daerah yang mengikuti sistem desentralisasi. Melayani kebutuhan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan nasional dengan sebaik-baiknya adalah tanggung jawab utama suatu negara. Suatu negara dikatakan berhasil jika dapat diukur dari produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya (Kurniullah et al., 2021).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan suatu negara memerlukan beberapa komponen salah satunya adalah ketersediaan sumber penerimaan untuk menjalankan aktivitas di setiap tingkat pemerintahan. Otonomi daerah adalah salah satu cara untuk memberikan pelayanan yang baik dan responsif. Otonomi daerah merupakan suatu kekuasaan daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada wilayah untuk menjalankan urusan mereka sendiri berdasarkan potensi dan karakteristik tiap-tiap daerah (Dewirahmadanirwati, 2018). Di era otonomi ini, pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan

potensi daerah dan sumber-sumber yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan, terutama untuk memenuhi pendanaan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah provinsi, kota dan kabupaten memiliki otoritas guna mengatur sendiri urusan dan kebijakan daerah. Dengan demikian, otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan.

Meningkatkan efektivitas dan capaian implementasi pemerintah daerah di bidang pelayanan dan pengembangan masyarakat adalah tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Dukungan keberhasilan pembangunan daerah dilakukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan memberikan wewenang untuk pemerintah daerah dari pemerintah pusat, otonomi daerah dimaksudkan bisa memberikan kemandirian kepada daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan cara untuk meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di daerah untuk mencapai kemandirian daerah (Firdausy, 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berupaya mempromosikan dana untuk penyerahan urusan terhadap pemerintah daerah, mendukung penerapan otonomi daerah. Karena tujuan pendapatan asli daerah sendiri adalah untuk memberi kemampuan pada daerah dalam mencari sumber dana dan menerapkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem desentralisasi (Badrudin, 2012). Dalam konteks otonomi daerah, Kota Pekalongan memiliki kewenangan untuk

mengelola keuangan daerahnya sendiri, termasuk menyusun APBD.

APBD Kota Pekalongan disusun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan. RKPD ini adalah uraian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan. APBD Kota Pekalongan disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Tiga bagian utama APBD adalah pendanaan daerah, belanja daerah, dan penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan aliran pendapatan daerah lain yang sah membentuk menjadi pendapatan daerah.

APBD berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik yang harus ditingkatkan, mendukung pembangunan, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pemerintah daerah diharapkan bisa mengelola keuangan daerah dengan efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan konsep otonomi daerah. Pemerintah daerah harus berupaya untuk mengelola penerimaan daerah dengan hati-hati, cermat, dan tepat. Pengelolaan pendapatan asli daerah adalah elemen utama pengelolaan wilayah yang membutuhkan pertimbangan yang cermat. Salah satu dari beberapa sumber penerimaan daerah dalam APBD adalah pendapatan asli daerah, yang diharapkan dapat menjadi bagian dari sumber daya keuangan dan kekayaan daerah yang dikendalikan untuk pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan

dan kegiatan pemerintahan. Banyak daerah di Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan PAD, termasuk Kota Pekalongan. Dalam konsep ekonomi syariah, pemerintah daerah dapat berperan sebagai Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengelola keuangan negara atau daerah untuk kemaslahatan masyarakat. Salah satu lembaga badan usaha milik daerah yang di atur langsung oleh Rasulullah ialah *Baitumal*, yang memiliki sejarah yang panjang dalam budaya ekonomi Islam. Nabi SAW dan para sahabat membuat pusat kendali dengan mempertahankan kontrol ekonomi dan memungut pajak negara dan zakat (Huda, 2017). Saat ini, peran *Baitul Mal* hanya sebagai instrumen penyalur zakat, pajak dan *ghanimah* yang sudah dikumpulkan kemudian diberikan untuk rakyat.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dan memenuhi kebutuhan masyarakat. BUMD dapat berkontribusi dalam meningkatkan PAD melalui operasionalnya dan penyediaan layanan publik yang berkualitas. BUMD dapat berperan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan, serta dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Daerah dapat berperan sebagai aktor yang berkontribusi pada pengembangan daerah dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai agama dan sosial dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Salah satu sumber strategis PAD di Kota Pekalongan adalah kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Perumda Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan.

Gambar 1. 1 Lambang Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan



Sumber Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan

Perumda Air Minum Tirtayasa sebagai salah satu BUMD di Kota Pekalongan memiliki peran penting dalam menyediakan layanan air minum yang berkualitas bagi masyarakat. Perumda Tirtayasa Kota bertanggungjawab atas distribusi air minum, pemeliharaan infrastruktur dan penyediaan layanan terkait di wilayahnya. Perumda Tirtayasa tidak hanya dituntut untuk memberikan layanan publik yang merata, tetapi juga menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi kas daerah. Namun, kontribusi Perumda Air Minum Tirtayasa dalam meningkatkan PAD Kota Pekalongan masih perlu ditingkatkan.

Kota Pekalongan secara geografis merupakan kota pesisir yang terletak di dataran rendah dengan ketinggian 0-2 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis dataran rendah pantai ini membuat Kota Pekalongan memiliki tantangan khusus dalam pengelolaan sumber daya air, terutama risiko pencemaran dan pasokan yang terbatas selama musim kemarau. Iklim tropis dengan musim hujan dan panas yang berganti juga menimbulkan variasi ketersediaan air yang harus dikelola cermat agar pasokan air bersih tetap stabil dan memenuhi standar kesehatan. Selain itu, kondisi topografi yang relatif datar memerlukan

sistem distribusi air yang efisien dan pemeliharaan infrastruktur yang teratur agar jangkauan layanan air bersih ke seluruh wilayah kota, termasuk kawasan padat penduduk dan daerah pinggiran, dapat terpenuhi secara merata.

Musim rob yang kerap datang membuat distribusi air bersih terganggu, kualitas air juga berpotensi menurun karena campuran air laut dan meningkatnya bahan pencemar. Kondisi ini sangat relevan untuk dikaji, mengingat Perumda Tirtayasa sebagai penyedia layanan air bersih harus dapat menghadapi tantangan geografis tersebut untuk menjaga kualitas dan kontinuitas pelayanan yang menjadi sumber penting Pendapatan Asli Daerah. Dengan kondisi geografis yang unik dan tantangan ekologi berupa rob, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran Perumda Tirtayasa dalam menyediakan layanan air bersih yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan yang rentan terhadap dampak perubahan lingkungan pesisir.

Peran BUMD dalam meningkatkan PAD tidak hanya dapat diukur dari besarnya kontribusi finansial. Dalam perspektif ekonomi syariah, kontribusi BUMD harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan-yakni memastikan distribusi manfaat yang adil, transparansi pengelolaan, serta berorientasi pada kemanfaatan sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep *Baitul Mal* dalam sejarah ekonomi Islam, di mana lembaga pengelola keuangan publik bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan kekayaan negara

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai syariat (Adam, 2020). Dengan demikian, BUMD idealnya berfungsi tidak sekadar sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

BUMD dapat berperan dalam meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan dan akuntabilitas dapat menjadi landasan bagi pengelolaan BUMD yang efektif dan efisien. Kota Pekalongan menunjukkan bahwa meskipun kontribusi finansial Perumda Tirtayasa terhadap PAD sudah konsisten, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa pengelolaan dan distribusi manfaatnya benar-benar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Masih diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan akses layanan air bersih, serta memastikan bahwa kebijakan tarif dan pengelolaan laba tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat luas. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis kontribusi Perumda Tirtayasa dalam meningkatkan PAD Kota Pekalongan berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apa kontribusi Perumda Tirtayasa terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan?

2. Bagaimana kontribusi Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan berdasarkan perspektif ekonomi syariah?
3. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Kota Pekalongan terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Untuk menganalisis kontribusi Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan berdasarkan perspektif ekonomi syariah
3. Untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian tersebut, penelitian ini memiliki beberapa manfaat, di antara nya:

1. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberikan wawasan dan dapat memperluas pengetahuan tentang kontribusi BUMD Kota Pekalongan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

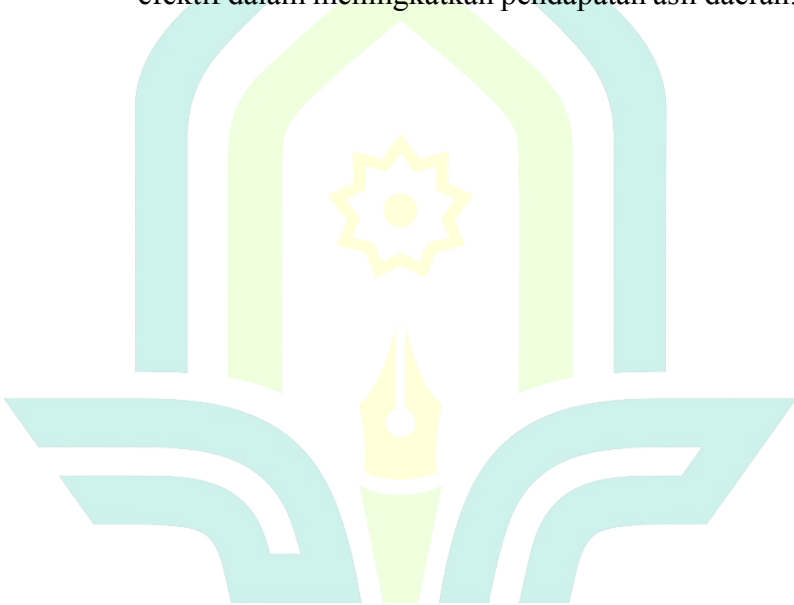
2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tentang kontribusi BUMD Kota Pekalongan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah supaya masyarakat juga mengetahui perkembangan terkini mengenai BUMD Kota Pekalongan serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kontribusi

BUMD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Bagi Pemerintah

Menjadikan referensi untuk pemerintah daerah dan BUMD lainnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan kemampuan BUMD Kota Pekalongan dalam mengembangkan strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dan BUMD dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan Kesimpulan pembahasan sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Perumda Tirtayasa memberikan kontribusi konsisten terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan melalui dividen yang disetorkan dari laba usaha penyediaan layanan air bersih. Kontribusi dividen Perumda Tirtayasa secara konsisten disetorkan ke kas daerah sesuai peraturan daerah, yaitu sebesar 55% dari laba bersih, yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik Kota Pekalongan. Prinsip keadilan ('adl) dan tanggung jawab sosial tercermin dalam penerapan aturan baku untuk mengalokasikan laba usaha secara transparan guna mendukung kemaslahatan masyarakat melalui pembangunan daerah. Pengelolaan yang baik terhadap kekayaan daerah yang dipisahkan serta strategi peningkatan jumlah pelanggan dan kualitas layanan turut memperkuat peran Perumda Tirtayasa dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Prinsip masalah (kemaslahatan umum) dan keadilan sosial di mana kegiatan ekonomi diarahkan untuk manfaat luas, tidak hanya profit, tetapi juga pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah. Perumda Tirtayasa tidak hanya mengejar keuntungan finansial semata, tetapi juga berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan dan

peningkatan kesejahteraan sosial. Terdapat tantangan seperti kualitas air dan gangguan distribusi yang masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Prinsip tanggung jawab sosial dan transparansi yang menuntut pengelola aktif melakukan perbaikan dan menjawab aspirasi masyarakat secara jujur dan terbuka. Hal ini menjadi sinyal penting bagi manajemen untuk memperkuat sistem pemeliharaan jaringan, pengawasan kualitas air, serta meningkatkan responsivitas terhadap keluhan pelanggan. Masih terdapat kebutuhan untuk memperluas ruang sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peran dan kontribusi Perumda dalam pembangunan daerah agar literasi publik terhadap keberadaan BUMD meningkat dan apresiasi masyarakat terhadap manfaatnya dapat lebih optimal.

2. Kontribusi Perumda Tirtayasa terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlandaskan maqashid syariah dan konsep baitul mal. Perumda Tirtayasa berperan sebagai lembaga pengelola sumber daya publik yang mengintegrasikan tujuan profit dengan keadilan sosial, kebermanfaatan, transparansi, dan keberlanjutan. Pengelolaan Perumda yang halal, adil, dan transparan mencerminkan maqashid menjaga agama (al-Din), dengan pengelolaan yang etis dan jauh dari praktik korupsi. Layanan air bersih yang tersedia menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa (al-Nafs) masyarakat, termasuk

melalui program subsidi bagi kelompok kurang mampu. Upaya peningkatan kapasitas dan transparansi informasi mendukung maqashid menjaga akal (al-‘Aql) serta mendorong partisipasi masyarakat. Pengelolaan berkelanjutan dan distribusi akses air yang adil menjamin keberlangsungan kehidupan generasi mendatang, sejalan dengan maqashid menjaga keturunan (an-Nasl). Selain itu, pengelolaan keuangan yang profesional dan berkeadilan dalam pendistribusian dividen serta alokasi untuk CSR dan kesejahteraan pegawai mencerminkan maqashid menjaga harta (al-Mal). Keseluruhan praktik Perumda Tirtayasa sesuai dengan prinsip baitul mal, yaitu pengelolaan dana untuk kesejahteraan umat secara adil, transparan, dan bermanfaat luas. Penyelarasan maqashid syariah dengan fungsi baitul mal menjadikan Perumda sebagai agen pembangunan ekonomi dan sosial yang bertanggung jawab serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan peningkatan PAD Kota Pekalongan secara berkelanjutan. Perumda Tirtayasa bukan hanya kontributor finansial, tetapi juga simbol harmonisasi antara tujuan ekonomi dan sosial dalam kerangka ekonomi syariah, yang berkontribusi pada kesejahteraan umum dan pembangunan daerah sesuai prinsip Islam.

3. Perumda Tirtayasa menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam seluruh aspek pengelolaan usaha. Penetapan tarif dilakukan secara baku dan transparan dengan pelanggan, pengelolaan layanan yang berorientasi

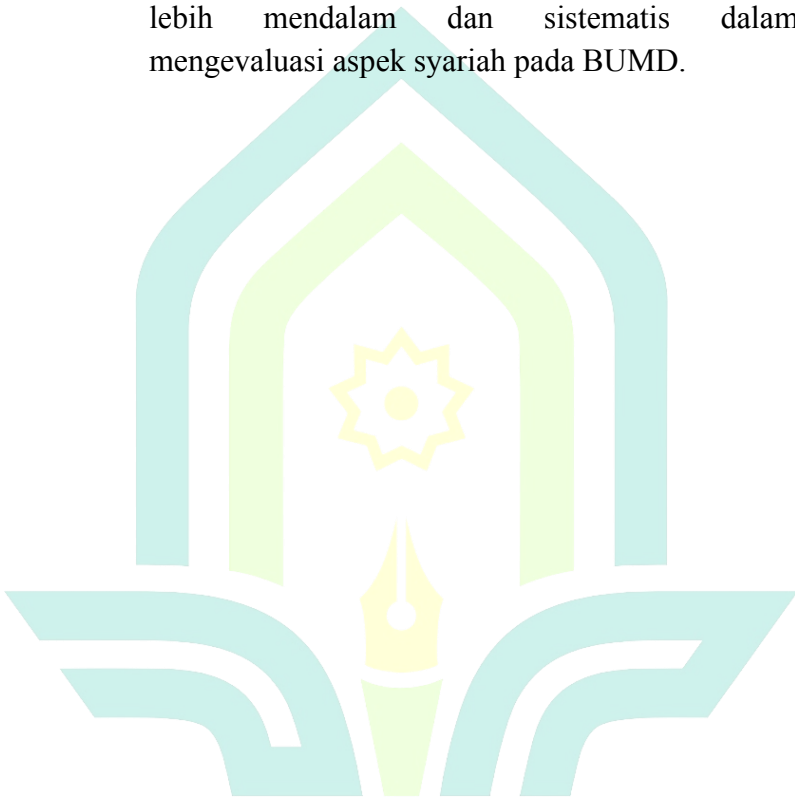
pada kesejahteraan masyarakat, serta komunikasi terbuka melalui media digital untuk mengakomodasi hak dan kewajiban pelanggan. Kegiatan sosial seperti pemberian subsidi dan diskon pada kelompok masyarakat kurang mampu juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip kemaslahatan. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi transparansi dan kualitas layanan yang perlu terus ditingkatkan agar prinsip syariah dapat terpenuhi secara maksimal. Perumda Tirtayasa tidak hanya memberikan kontribusi yang konsisten terhadap PAD Kota Pekalongan secara finansial, tetapi juga mewujudkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam tata kelola dan operasionalnya demi kemaslahatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini tentunya masih memiliki banyak keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi penelitian, diantaranya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan Perumda Tirtayasa sebagai objek studi serta melibatkan responden terbatas dari kalangan staf internal dan sejumlah pelanggan. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk semua BUMD di Kota Pekalongan atau daerah lain, serta belum sepenuhnya menggambarkan pandangan seluruh masyarakat pengguna layanan.
2. Analisis kontribusi Perumda Tirtayasa dan penerapan prinsip ekonomi syariah lebih banyak didasarkan pada data kualitatif berupa wawancara dan dokumen pendukung, sementara data

kuantitatif terkait pengukuran aspek keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam operasional Perumda masih terbatas. Hal ini menyebabkan pemahaman tentang penerapan ekonomi syariah dalam konteks usaha dan manfaat sosial belum dapat diukur secara komprehensif. Keterbatasan ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan sistematis dalam mengevaluasi aspek syariah pada BUMD.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adam, K. (2020). Baitul Mal Sebagai Sumber Keuangan Publik Berbasis Maqashid Syariah. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 138–149.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).
- Asnawi, M., Widiarsih, D., & Susanti, D. (2024). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI RIAU. *Jurnal Economica: Media Komunikasi ISEI Riau*, 12(1), 89–96.
- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Ayuningtyas, D. D., Usriyah, N. N., & Hardjati, S. (2020a). Peran BUMD Dalam Meningkatkan PAD Surabaya (Studi Kasus Kebun Binatang Surabaya). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik (JSEP)*, 1(2).
- Ayuningtyas, D. D., Usriyah, N. N., & Hardjati, S. (2020b). Peran BUMD Dalam Meningkatkan PAD Surabaya (Studi Kasus Kebun Binatang Surabaya). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik (JSEP)*, 1(2).

- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika otonomi daerah*. UPP STIM YKPN.
- Dewi, L. E. (2022). Analisis pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi penerimaan BUMD terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5035–5040.
- Dewirahmadanirwati, D. (2018). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah Sumatera Barat: Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 2(3), 43–50.
- Dianniar, U. (2023). Analisis Kontribusi Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Abdi Equator*, 3(1), 25–41.
- Firdaus, A. S. (2024). Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 181–209. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i2.22209>
- Firdaus, M. R., Anwar, H. S., & Malik, I. (2022). Efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2017-2019 di Kota Bandung. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4129–4138.
- Firdausy, C. (2018). *Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Halim, A. (2004). Manajemen keuangan daerah. *Yogyakarta: Upp Amp Ykpn*.
- Hana Malika Rahmah Sitorus, & Fadila Putri. (2025). Keadilan Ekonomi dalam Islam: Konsep, Prinsip dan Implementasi. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu*

Manajemen Dan Ekonomi Syariah, 3(3), 240–248.
<https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1957>

Hasanah, S. N. (2025). Analisis Pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sumenep. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 289–303.

Hidayat, F. (2024). Peran Baitul Mal pada Era Nabi Muhammad dalam Pengelolaan Fiskal dan tatanan Sosial Ekonomi. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 103–111.

Huda, N. (2017). *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Prenada Media.

Ismail, A., Hardi, E. A., & Noor, F. (2022a). Analisis Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada PDAM Tirta Batanghari). *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 1(4), 20–34.

Ismail, A., Hardi, E. A., & Noor, F. (2022b). Analisis Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada PDAM Tirta Batanghari). *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 1(4), 20–34.

Karim, A. A. (2015). *Ekonomi Makro Islami* (Edisi : 3). RajaGrafindo Persada.

Kurniullah, A. Z., Faried, A. I., Saragih, H., Wisnujati, N. S., Amruddin, A., Syafrizal, S., Yusa, I. M. M., Hasnidar, H., Daud, D., & Prijanto, J. H. (2021). *Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Yayasan Kita Menulis.

- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Listiani, N., & Soesilowati, E. S. (2013). *Komparasi sistem remunerasi pada instansi pemerintah dan BUMD*. LIPI Press.
- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., Fitra, F., Aryawati, N. P. A., Ridha, N. A. N., & Milasari, L. A. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Widina.
- Munandar, Z., Yusuf, Z., & Chairani, M. (2023). Pengaruh Laba Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(6), 2831–2841.
- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Ak, M., Deni, H. A., Mm, C. Q. M., Santoso, Y. H., Se, S., Paharuddin, S. T., Suacana, I. W. G., & Indrayani, E. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Noor, H. R. Z. Z. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: petunjuk praktis untuk penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi: tahun 2015*. Deepublish.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Publisher.
- Nurhadi, L., Eny, S. W. H., & Ascarya, A. R. M. (2021). Metode Penelitian Ekonomi Islam, ed. Andi Triyawan. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Nurhaedah, N., Marif, M., & Ramadhani, R. (2023). Functions of the State in the Implementation of

Social Responsibility by State-Owned Enterprises. *International Conference on "Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry"* (ICCLB 2023), 1296–1304.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTAYASA, Pub. L. No. NOMOR
15 TAHUN 2018 (2018).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH,
Pub. L. No. 17 (2017).

Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan
Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi
Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.

Putri, S. D. Y. (2024). KONTRIBUSI BUMD DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Studi
Kasus pada PT. Pelabuhan Kepri). *Miftahul Ulum*,
2(2), 46–53.

Rianto, S. (2017). Perusahaan Daerah, Eksistensi, Peran,
dan Fungsinya. *Semarang: Suara Merdeka*.

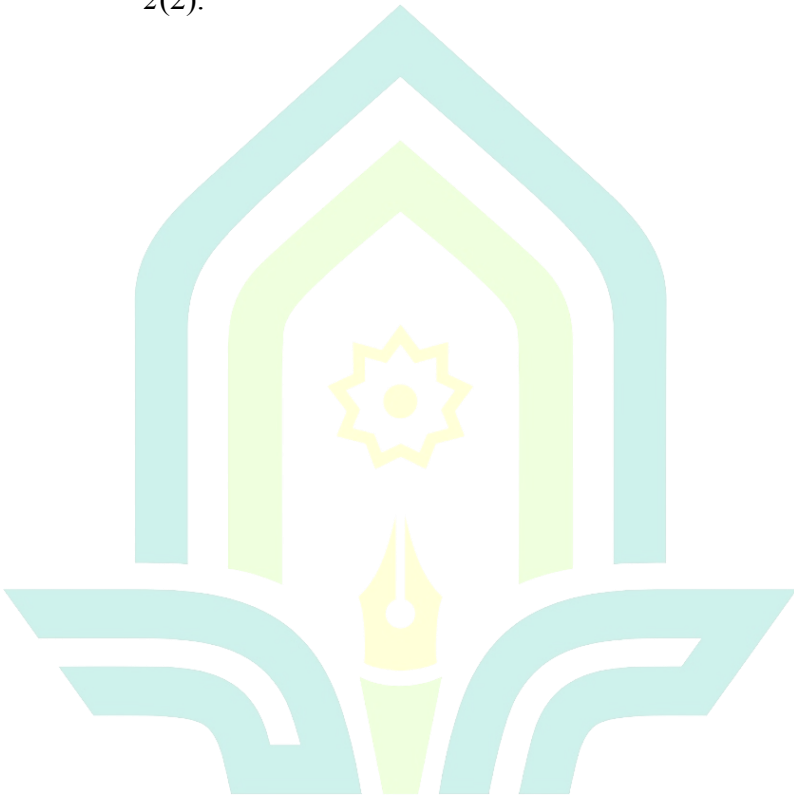
Rori, C. F. (2016). Analisis pengaruh pendapatan asli
daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Sulawesi Utara tahun 2001-2013. *Jurnal
Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).

Sa'bandiyah, U. F., Hamid, A. M., & Ayu, I. (2025).
Peran Maqashid Syariah Dalam Mendukung
Keberlanjutan Lingkungan Melalui Implementasi
Green Economy: Studi Kasus Tenun Ikat Di
Parengan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah
Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan
Pendidikan*, 4(6), 709–722.

- Safira, R., & Yafiz, M. (2022). Analisis Pengaruh Kontribusi Bumd Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(7), 1887–1896.
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2015). *Maqashid bisnis dan keuangan Islam: Sintesis fikih dan ekonomi*.
- Setiaji, B., & Zaman, B. (2025). Efektivitas dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(1), 150–164.
- Sugiarto, I. (2025). *Pengantar Ekonomi Islam*. CV. Intake Pustaka.
- Sugiyono Prof, D. (2011). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro (PDFDrive). pdf. *Bandung Alf*, 143.
- Sukamto, S., & Siti, M. (2024). *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah*.
- Sulaeman, S. (2018). Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Diktum*, 98–117.
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- Syalafudin. (2025, August 28). *Didik Pramono Desak Wali Kota Copot Pejabat PDAM Pekalongan yang Diduga Tidak Profesional*. Pantura24.Com.
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Yani, A. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Ed. Rev Cet 5). Jakarta : Rajawali Pers., 2013.

Yani, T. A. (2019). Pengadministrasian Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Sebagai Tanggung Jawab dalam Mensejahterakan Rakyat. *Jurnal Public Policy*, 2(2).



Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama : Muhammad Darul Fikri
2. TTL : Pemalang, 13 November 2002
3. Alamat : RT. 001/RW. 005Desa Tasikrejo,
Kecamatan Ulujami Kabupaten
Pemalang
4. No. Handphone : 0895617884986
5. Email : darulfikri120317@gmail.com
6. Nama Ayah : Maryanto
7. Nama Ibu : Harniti

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK : RA Raudhatussibyan Hadirul Ulum Tasikrejo
2. SD : MISS Hadirul Ulum Tasikrejo Ulujami
3. SMP : MTs Walisongo Ulujami Pemalang
4. SMA : MAS Simbang Kulon Buaran Pekalongan